

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman yang begitu cepat menjadikan manusia lebih mudah dalam melakukan segala aktifitasnya, kemajuan sains dan ilmu pengetahuan menghantarkan kita pada khazanah keilmuan yang semakin banyak dan mudah diakses. Tanpa terkecuali ilmu komunikasi, walaupun disiplin ilmu tersebut

masih muda, namun perkembangannya semakin pesat dan menjadi kebutuhan sehari-hari manusia.

Tanpa adanya komunikasi, sejarah peradaban manusia tidak akan dapat maju dan berkembang sebagaimana tak ada hubungan yang memungkinkan informasi atau pesan dapat dibagi kepada orang lain yang membuat informasi atau wawasan dan pesan dapat tersampaikan, berbagai sumber menyebutkan bahwa kata *komunikasi* berasal dari bahasa latin *communis*, yang berarti 'membuat kebersamaan' atau 'membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih'. Kalau kita melihat dari segi bahasa komunikasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan satu, dua atau lebih orang untuk bertukar pikiran, perasaan-perasaan, dan informasi.

Menurut Katz dan Khan dalam Ruslan (2003 : 83), mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran informasi dan penyampaian makna merupakan hal utama dari suatu sistem sosial atau organisasi. Untuk dapat terjadi proses komunikasi, minimal terdiri dari tiga unsur utama yaitu, pengirim pesan, pesan dan target penerima pesan itu sendiri, dengan tiga unsur tersebut maka proses komunikasi akan dapat berjalan.

Pada terapannya proses komunikasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup dan terlahir normal, akan tetapi proses komunikasi bisa dilakukan oleh siapa pun tanpa terkecuali saudara kita penyandang disabilitas, semua orang berhak mendapatkan haknya untuk berkekspresi dan berkomunikasi. Hal ini berpijak pada pasal 28f ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, di mana pasal tersebut menyiratkan secara eksplisit tentang hak manusia dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Secara logis hal tersebut sangatlah beralasan karena apabila seseorang tidak mendapatkan informasi dan hak berkomunikasi, maka orang tersebut tidak akan mampu bersentuhan dengan manusia lainnya.

Namun banyak dari kita yang masih mengesampingkan saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal komunikasi, padahal dalam Al-Qur’an kita diajarkan bahwa tidak ada makhluk yang paling hebat didunia dan tidak ada makhluk paling mulia disisinya melainkan yang dilihat adalah amal dan imannya, bahkan kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan setiap makhluk, saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus sudah sepatutnya kita penuhi hak-haknya diantaranya hak dalam berkomunikasi.

Menurut data statistik yang dihimpun oleh WHO atau organisasi kesehatan dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia.¹ Di Indonesia, penyandang disabilitas pada tahun 2011

¹ Understanding Disability, Chapter 1, dalam *Word Report on Disability*, (Malta: HWO and The Word Bnk, 2011) hml. 3

mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 penyandang disabilitas Indonesia diperkirakan sebanyak 1. 480. 000 dengan rincian yaitu, penyandang tunadaksa berjumlah 162. 800 orang (11%) tunanetra 192. 400 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkulosis) 236. 800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tertinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan.²

Indonesia telah memiliki payung hukum UU No. 4 tahun 1997 dan kemudian di revisi menjadi UU No. 8 Tahun 2016 untuk melindungi dan menjamin hak bagi penyandang disabilitas, namun pada implementasiannya masih banyak pengabaian dan pelanggaran. Padahal dalam pasal 24 point b menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.

Apabila kita menilik data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dikeluarkan BPS, bahwa jumlah penyandang disabilitas sebesar 8,56 persen dari total penduduk Indonesia. Data ini tergolong besar karena ada sekitar 21,8 juta masyarakat penyandang disabilitas dari total 254,9 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS, 2016).

Belum lagi masih banyaknya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas baik secara kehidupan sosial seperti berkomunikasi dan juga hak dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan juga pekerjaan, fakta yang ditemukan adalah tidak adanya penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan dan masih banyaknya berbagai perusahaan membuat persyaratan kerja yang sangat diskriminatif bagi kaum disabilitas seperti; harus menyertakan surat keterangan jasmani dan rohani (CIQAL, MPM, & ILAI, 2015). Sehingga tidak heran jika program kebijakan terkait penyandang

² Nicola Gobran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*, (Indonesia: Australian AIF, 2010). hlm. 29

disabilitas memang tidak terimplementasi dengan baik dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (Adioetomo et., 2016; dan Dewi, 2015).

Menanggapi permasalahan kaum disabilitas yang tidak kunjung usai, membuat sekelompok lembaga swadaya masyarakat dan juga NGO (*Non Government Organization*) berinisiatif untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai manusia yaitu memanusiakan manusia. NGO yang biasanya hadir dari kelompok masyarakat yang resah terhadap suatu permasalahan mempunyai peranan yang sangat penting. hadirnya NGO ditengah-tengah masyarakat khususnya yang termarginalkan menjadi suatu hal yang sangat baik karena NGO adalah suatu organisasi yang biasanya dibentuk bukan karena ada kepentingan apapun akan tetapi mereka terbentuk atas kesadaran dan kegelisahaan sehingga memiliki keterbukaan dan kedekatan terhadap masyarakat marjinal, memiliki idealisme dan tanggung jawab yang tinggi, dapat mengembangkan kepercayaan dimasyarakat, serta memiliki defektifitas biaya yang relatif tidak terlalu korup (Sunartningsih, 2004).

Salah satu NGO yang terlibat aktif dalam memberdayakan kaum disabilitas di Yogyakarta adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keterlibatan Muhammadiyah didasarkan pada asih dominannya marginalisasi, penindasan, eksklusi, serta tindakan kekerasan baik fisik, verbal, sosial, maupun spritual yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah (Muhammadiyah, 2015).

Kiprah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah tidak bisa diragukan lagi, sebab sudah berbagai macam dakwah yang dilakukan oleh MPM itu sendiri baik dari pemberdayaan desa tertinggal, sampai pemberdayaan

penyandang disabilitas, hal ini tidak terlepas dari agenda pemberdayaan masyarakat umat yang secara eksplisit telah tertuang dalam Tanfidz keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005. Muhammadiyah hadir dalam pemberdayaan umat dan bangsa sebagai manifestasi dari peran Muhammadiyah dalam pengembangan masyarakat madani di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut MPM hadir dalam dakwahnya kepada seluruh bangsa dan negara ini, dan MPM juga menjadikan kelompok difabel sebagai program unggulannya yaitu jihad memberdayakan kaum difabel yang meliputi, penguatan kapasitas kaum difabel, fasilitas publik bagi kaum difabel, dan lapangan kerja bagi kaum difabel.³

Maka penulis bukan tanpa sebab melakukan penelitian terhadap MPM, guna mencari tahu strategi komunikasi MPM dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini kepada strategi komunikasi apa yang dilakukan MPM kepada kelompok penyandang disabilitas, peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi sumber referensi dakwah baik dari organisasi islam itu sendiri maupun organisasi yang lainnya untuk berperan dalam menyebarkan dakwah islam keseluruh nusantara.

B. Pokok & Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada penyandang disabilitas.

Adapun rumusan masalahnya adalah:

³ Selayang Pandang Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap penyandang disabilitas.
2. Bagaimana peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pemberdayaan dikelompok penyandang disabilitas.
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dalam melaksanakan komunikasi kepada kelompok penyandang disabilitas.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan strategi komunikasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dikelompok penyandang disabilitas.
2. Mendeskripsikan peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dalam pemberdayaan dikelompok penyandang disabilitas
3. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam berkomunikasi dengan kelompok penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang terkait dengan disiplin Ilmu Komunikasi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan organisasi lain dalam pengembangan komunikasi kepada penyandang disabilitas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi atau wawasan baik secara teoritik maupun empirik mengenai pentingnya berdakwah kepada kelompok penyandang disabilitas

b. Bagi penliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah keilmuan baru serta pengalaman bagi peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan teori disiplin ilmu bagi peneliti lain.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam penambahan ilmu baru untuk mengetahui pentingnya kita berdakwah kepada kelompok penyandang disabilitas.